

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjamin kelangsungan pembangunan suatu bangsa. Peningkatan kualitas SDM, jauh lebih mendesak untuk segera direalisasikan terutama dalam menghadapi era persaingan global beberapa tahun ke depan. Pada masa yang akan datang, peningkatan daya saing suatu bangsa perlu mendapat perhatian yang serius khususnya dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga kompetitif (Suryadi, 2005: 117).

Untuk mencapai tujuan ini diperlukan aktualisasi pendidikan nasional yang baru dengan prinsip-prinsip: (1) partisipasi masyarakat didalam mengelola pendidikan (*community based education*), (2) demokratisasi proses pendidikan, (3) sumber daya pendidikan yang profesional; dan (4) sumber daya penunjang yang memadai (Tampubolon, 2006: 8). Kompleksitas masalah pendidikan menjadi semakin terasa, sehingga jika dipandang dari sudut kualitas harus disediakan gedung sekolah, biaya pendidikan dan tenaga guru dalam jumlah yang memadai. Sedangkan dari sudut kualitas yang saat ini menjadi banyak perhatian umum adalah masalah mutu pendidikan. Salah satu permasalahan pendidikan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidik, khususnya pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Banyak pihak berpendapat bahwa rendahnya mutu pendidikan merupakan salah satu faktor yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi tuntutan pembangunan bangsa di berbagai bidang (Wakhinudin, 2005: 10). Rendahnya mutu pendidikan terkait dengan skenario yang dipakai oleh pemerintah dalam membangun pendidikan, yang selama ini lebih menekankan pada pendekatan input-output. Pemerintah berkeyakinan bahwa dengan meningkatkan mutu input maka dengan sendirinya akan dapat meningkatkan mutu output. Dengan keyakinan tersebut, kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah adalah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan guru, menatar para guru, dan menyediakan dana operasional pendidikan secara lebih memadai (Pidarta, 2004: 23).

Kenyataan tersebut memberi gambaran umum bahwa pendekatan *input-output* secara makro belum menjamin peningkatan mutu sekolah dalam rangka meningkatkan dan meratakan mutu pendidikan. Hal ini tidak saja terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di negara-negara lain. Hasil penelitian untuk sekolah dasar negeri di Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa input sekolah mempunyai pengaruh yang kecil terhadap hasil belajar peserta didik (Scheerens, 2006: 12).

Pemerintah bersama dengan pihak swasta giat melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Namun demikian, pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta masih belum berjalan secara sinergis.

Pada daerah tertentu masih terdapat kendala berupa kurangnya daya tampung lembaga pendidikan, sedang pada daerah lain terjadi kelebihan daya tampung sehingga banyak gedung sekolah yang mengalami kekurangan murid

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, pengadaan buku-buku dan alat pengajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian berbagai indikator mutu pendidikan dalam menunjukkan peningkatan, namun sebaliknya sekolah yang berada di daerah masih memprihatinkan karena kurang berimbang input dengan output.

Dalam perspektif model masukan (*input*) dan keluaran (*output*) pendidikan, efektivitas sekolah sering diasumsikan sebagai suatu kombinasi atau perbandingan antara apa yang telah dihasilkan sekolah (*school output*) dan apa yang telah dimasukkan ke dalam sekolah (*school input*). Berdasarkan perspektif ini, Lockheed (2006) mengatakan jika masukan sekolah dan proses sekolah (jumlah buku teks, organisasi kelas, strategi mengajar, profesional pelatihan guru, dsb) ditetapkan sebagai *non-monetary input*, maka perbandingan antara fungsi keluaran sekolah dan *non-monetary input* sekolah dapat disebut sebagai efektivitas sekolah.

Apabila dicermati, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah hakikatnya tidak terlepas dari setiap jaringan kerja yang berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Jaringan-jaringan kerja seperti manajemen sekolah, kinerja

karyawan, dan lain sebagainya merupakan komponen penting untuk mewujudkan mutu pendidikan di sekolah. Oleh karenanya penataan masing-masing komponen tersebut merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam upaya mencapai keberhasilan pendidikan.

Burhanuddin (2004: 17) mengemukakan bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan rendahnya kemampuan teknis maupun sistematis dari pelaksana manajemen sekolah sehingga perlu pembinaan secara intensif. Kenyataan ini dirasakan seperti halnya ketika muncul perubahan-perubahan inovatif di bidang kurikulum atau bidang lainnya dari pusat yang sering membawa dampak pada ketidakpastian di lapangan yang pada gilirannya menimbulkan berbagai hambatan dan kesulitan.

Nasution (2006: 78) menyatakan bahwa persoalan-persoalan teknis yang ada pada para pelaksana pendidikan (seperti guru dan kepala sekolah) yakni munculnya kecenderungan bersikap konservatif terhadap inovasi pendidikan. Para pelaksana pendidikan cenderung memilih/mempertahankan cara lama yang dirasa telah menjadi rutinitas daripada melakukan perubahan dan inovasi dari kebijakan baru yang merubah kebiasaan yang telah terlaksana. Keadaan ini tentunya akan menghambat kelancaran penyelenggaraan manajemen sekolah sehingga memerlukan adanya inovasi pendidikan.

Kendala-kendala yang mempengaruhi keberhasilan usaha inovasi pendidikan seperti inovasi kurikulum antara lain: (1) perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi, (2) konflik dan motivasi yang kurang sehat, (3)

lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan, (4) keuangan (*financial*) yang tidak terpenuhi, (5) penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi, (6) kurang adanya hubungan sosial dan publikasi (Subandiyah 2006, 81). Untuk menghindari masalah-masalah tersebut di atas, dan agar mau berubah terutama sikap dan perilaku terhadap perubahan pendidikan yang sedang dan akan dikembangkan, sehingga perubahan dan pembaharuan itu berhasil dengan baik, maka diperlukan keterlibatan guru, administrator, orang tua peserta didik, dan masyarakat.

Inovasi baru yang dibuat oleh orang lain terutama dari pusat (khususnya Depdiknas) belum sepenuhnya melihat kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh guru dan peserta didik. Hal ini juga diungkapkan oleh Munro (2004: 36) yang mengatakan bahwa "*mismatch between teacher's intention and practice is important barrier to the success of the innovatory program*".

Dalam kerangka pembaharuan pendidikan, keterlibatan guru mulai dari perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya memainkan peran yang sangat besar bagi keberhasilan suatu inovasi pendidikan. Tanpa melibatkan mereka, maka sangat mungkin mereka akan menolak inovasi yang diperkenalkan kepada mereka. Hal ini seperti diuraikan sebelumnya, karena mereka menganggap inovasi yang tidak melibatkan mereka adalah bukan miliknya yang harus dilaksanakan, tetapi sebaliknya mereka menganggap akan mengganggu ketenangan dan kelancaran

tugas mereka. Oleh karena itu, dalam suatu inovasi pendidikan, gurulah yang utama dan pertama terlibat karena guru mempunyai peran yang luas sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai dokter, sebagai motivator dan lain sebagainya (Wright, 2004 : 101).

Keberadaan guru tersebut khususnya dioptimalkan dalam rangka pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Menurut Wakhinudin (2005: 4) bahwa kualitas manajemen kelas, strategi mengajar, dan konsep diri peserta didik dan guru penting dalam mengajar di kelas. Iklim manajemen kelas harus adil dan jujur (*fair play*) demi menjaga eksistensi hak azasi manusia di kelas.

Iklim manajemen kelas tersebut diciptakan semenjak pendidikan pra sekolah hingga pendidikan tinggi. Khususnya dalam penelitian ini difokuskan pada manajemen kelas di Taman Kanak-kanak. Pendidikan sedini mungkin bagi anak usia 0 sampai enam tahun mendapat perhatian mengingat sejak usia bayipun seorang anak sudah mulai belajar. Sesuai jenjang pendidikan yang dirumuskan dalam Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan bagi anak yang akan memasuki sekolah disebut dengan pendidikan Pra Sekolah (Depdiknas, 2007: 22). Pentingnya pendidikan prasekolah bagi anak sudah diakui secara internasional. Selain itu Andersen (2007: 112) menyatakan pentingnya pendidikan prasekolah sehingga dalam masyarakat banyak bermunculan lembaga-lembaga pendidikan prasekolah yang sebagian besar diselenggarakan masyarakat dewasa ini. Hal tersebut mengindikasikan betapa besarnya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan pra sekolah ini.

Tingginya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan prasekolah, setidaknya dapat dilihat dari tiga alasan pokok, yaitu: (1) dilihat dari perkembangan usia anak, para ahli memandang bahwa usia prasekolah merupakan fase yang sangat mendasar bagi perkembangan anak, (2) dilihat dari hakikat belajar dan perkembangan yang menunjukkan bahwa kegiatan belajar dan perkembangan awal merupakan dasar bagi proses belajar dan perkembangan selanjutnya, dan (3) adanya tuntutan-tuntutan non edukatif yang mendorong para orang tua memasukkan anak-anaknya ke pendidikan prasekolah (Mulyadi, 2006: 7).

Salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang berkembang saat ini adalah Taman Kanak-Kanak (TK) seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Bab 1 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan : “Taman Kanak-Kanak adalah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi usia anak usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar” (Depdiknas, 2004: 125). Tujuan pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. (Depdiknas, 2004: 2). Untuk mencapai semua itu diperlukan suatu perhatian khusus, terutama pendidikan sejak dini, yaitu sebuah pendidikan Taman Kanak-Kanak yang dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kurikulum

yang berlaku agar anak dapat mengembangkan seluruh kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan tahap perkembangannya.

Kecenderungan yang terjadi di lapangan sebagaimana hasil para survei yang dilakukan di TK PG. Colomadu Kabupaten Karanganyar, menunjukkan adanya penekanan pada pembelajaran dalam bidang sosial. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa salah satu sikap dasar yang harus dimiliki seorang anak untuk menjadi seorang manusia yang baik dan benar adalah memiliki sikap dan nilai moral yang baik dalam berperilaku sebagai umat Tuhan, anak, anggota keluarga dan anggota masyarakat. Usia Taman Kanak-Kanak adalah saat yang paling baik bagi guru Taman Kanak-Kanak, untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan nilai, moral dan agama kepada anak Taman Kanak-Kanak.

Walaupun peran orang tua sangatlah besar dalam membangun dasar moral dan agama bagi anak-anaknya, peran guru Taman Kanak-Kanak juga tidaklah kecil dalam meletakkan dasar moral dan agama bagi seorang anak, karena biasanya anak-anak Taman Kanak-Kanak senang menuruti perintah gurunya. Oleh karena itu, seorang guru Taman Kanak-Kanak harus selalu berupaya dengan berbagai cara agar dapat membimbing anak usia Taman Kanak-Kanak agar mempunyai kepribadian yang baik, yang dilandasi dengan nilai moral dan agama. Dengan diberikannya landasan pendidikan moral dan agama kepada anak Taman Kanak-Kanak, seorang anak Taman Kanak-Kanak dapat belajar membedakan perilaku yang benar dan salah. Contohnya, di Taman Kanak-Kanak seorang anak Taman Kanak-Kanak dapat belajar bahwa



mereka tidak boleh menjadi anak yang senang berbohong, mengambil barang yang bukan miliknya atau mengganggu orang lain.

Hal yang perlu menjadi bahan pemahaman para guru dan orang tua dalam rangka menentukan pendekatan yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar adalah pengetahuan tentang teknik membentuk perilaku sosial anak. Teknik-teknik itu meliputi teknik memahami, mengabaikan, mengalihkan perhatian, keteladanan, hadiah, perjanjian, membentuk, merubah lingkungan rumah, memuji, mengajak, menantang, menggunakan akibat yang wajar dan alamiah, sugesti, meminta, peringatan atau isyarat, kerutinan dan kebiasaan, menghadapi suatu problem, memecahkan perselisihan, menentukan batas-batas aturan, menimpakan hukum, penentuan waktu dan jumlah hukuman, serta menggunakan pengendalian secara fisik.

Gejala-gejala di atas menarik untuk dikaji, baik pelacakan kebenaran maupun langkah-langkah pembelajaran Taman Kanak-kanak berbasis sosial. Asumsi dari kegiatan tersebut bahwa sebagai salah satu lembaga pendidikan pra sekolah, TK PG. Colomadu tidak lepas dari upaya penataan manajemen sekolah secara profesional. Program pembentukan perilaku sosial merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak di Taman Kanak-kanak. Melalui program ini diharapkan anak dapat melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang dimaksud meliputi pembentukan moral Agama, Pancasila, perasaan/emosi, kemampuan bermasyarakat dan disiplin.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah penelitian di atas, maka fokus penelitian ini: “Bagaimana pengelolaan pembelajaran Taman Kanak-Kanak berbasis sosial?” Fokus tersebut dirinci menjadi 3 subfokus.

1. Bagaimana merencanakan pembelajaran Taman Kanak-Kanak berbasis sosial ?
2. Bagaimana karakteristik media pembelajaran Taman Kanak-Kanak berbasis sosial?
3. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Taman Kanak-Kanak berbasis sosial?

## **C. Tujuan Penelitian**

Ada 3 tujuan penelitian yang ingin dicapai:

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran Taman Kanak-Kanak berbasis sosial.
2. Mendeskripsikan karakteristik media pembelajaran Taman Kanak-Kanak berbasis sosial.
3. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Taman Kanak-Kanak berbasis sosial.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki sumbangan teoritis dalam khasanah pengetahuan dalam bidang manajemen pendidikan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan informasi bagi praktisi pendidikan (guru TK) mengenai pentingnya pengelolaan pembelajaran, khususnya aspek pembelajaran berbasis sosial.
- b. Bagi *stakeholders* pendidikan, sebagai bahan kaji untuk rujukan pengambilan keputusan, terutama yang terkait langsung dengan persoalan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

## E. Definisi Istilah

1. Pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang terjadi pada diri peserta didik sebagai akibat dari kegiatan pembelajaran (Sudjana, 2005 : 29). Istilah pembelajaran yang diangkat dalam proses pendidikan didasarkan atas pendekatan *andragogy* (ilmu dan seni membantu orang dewasa belajar), dan bukan berdasarkan pendekatan *pedagogy* (ilmu dan seni mengajar anak-anak), namun dalam perkembangannya, pelaksana pembelajaran itu dapat menggunakan pendekatan kontinu, yaitu dimulai dari pendekatan pedagogi yang diikuti oleh pendekatan andragogi. Pendekatan kontinu inipun tetap bertumpu pada upaya membantu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar (Bloom, 2004: 7-8).
2. Pengelolaan pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi kegiatan merumuskan tujuan, menentukan strategi pengajaran, pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar, dan sebagainya.